

POTENSI WILAYAH DAN MODERNISASI DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN*

Sutomo ROESNADI

1. PENDAHULUAN

Mengingat hampir 80% penduduk Indonesia berada di pedesaan, maka selayaknyalah kiranya apabila dalam perencanaan dan pelaksanaan Pelita dewasa ini, pengembangan wilayah mendapat perhatian menonjol, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa aspek-aspek pelayanan sosial, pengenalan teknologi baru di pedesaan akan mempunyai dampak terhadap masyarakat pedesaan itu sendiri. Berhasil atau tidaknya kesejahteraan masyarakat pedesaan ditingkatkan, tergantung pula dari cepat atau tidaknya proses penyesuaian sosial-budaya mereka dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah di wilayah tersebut.

Proses penyesuaian sosial-budaya dan tradisi masyarakat desa dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan pengenalan teknologi baru tergantung pula pada faktor-faktor berikut:

- (a) seberapa jauh pelaksanaan keputusan-keputusan pemerintah pusat dilaksanakan dengan baik melalui jalur-jalur administrasi dan politik pemerintah lokal;
- (b) bagaimanakah implementasi pengenalan teknologi baru dan dampaknya terhadap masyarakat pedesaan;
- (c) bagaimanakah tingkat kemajuan dari masyarakat pedesaan yang ada;
- (d) keserasian sentralisasi dan desentralisasi;
- (e) memperhatikan perimbangan kepentingan nasional dan wilayah.

* Dalam versi yang hampir sama diajukan dalam *Lokakarya Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi dengan IPB-ITB dan UI* pada 17 Maret 1981. DR. Sutomo Roesnadi adalah Staf Pengajar FIS-UI, ex-Direktur Studi Pembangunan Indonesia, FIS-UI—ISS Den Haag.

Mengingat berbagai ragamnya adat-istiadat, serta kondisi berbagai wilayah Indonesia (topografi, geografi, iklim, sumber-daya dan lain-lain), maka mungkin pengembangan wilayah di Indonesia ini tidak bisa mengambil pola yang seragam.

Dengan demikian setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi dari setiap wilayah tersebut, seperti halnya yang telah dilakukan dalam pengkategorian berbagai pengembangan wilayah utama di tanah air. Sudah tentu hal ini tidak berarti akan menyimpang dari pola dasar Pembangunan Nasional sendiri, seperti tertera pada GBHN maupun pada Pelita. Sebaliknya hal tersebut merupakan rangkaian keterpaduan kebijakan pemerintah yang didukung oleh adanya keserasian dalam pengembangan wilayah di berbagai daerah pedesaan. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa ketimpangan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan tidak mendapat perhatian selayaknya.

Di dalam masalah ini penulis akan mencoba menyajikan beberapa aspek potensial yang mungkin dapat digali, dikembangkan atau dibangkitkan kembali yang berasal dari daerah pedesaan itu sendiri, sehingga akan merupakan sokoguru yang tangguh dalam menunjang pengembangan wilayah.

2. NILAI-NILAI TRADISIONAL DAN MODERN

Era pembangunan yang telah memasuki pertengahan dasawarsa kedua di negara kita telah sama-sama kita saksikan dan alami dengan diintroduksikannya nilai-nilai modern melalui bermacam-macam tahapan pengetrapan teknologi, dan pada waktu yang sama terjadi pula proses pudarnya atau musnahnya nilai-nilai tradisional.

Teknologi komunikasi yang begitu cepat menjalar hampir ke seluruh pelosok pedesaan, tidak ayal lagi menimbulkan efek-efek negatif, di samping efek-efek yang menguntungkan bagi daerah-daerah tersebut.

Rakyat pedesaan diperkenalkan dengan berbagai produk teknologi modern, baik yang berupa bahan-bahan kimia, misalnya makanan, sandang, pupuk, obat-obatan, tanaman jenis unggul, dan produk-produk teknologi lainnya berupa mesin-mesin. Mengingat cepatnya teknologi komunikasi yang berkembang di tanah air kita terutama di Pulau Jawa, maka peranan nilai-nilai tradisional mulai didesak atau diambil alih sama sekali oleh nilai-nilai modern tadi.

Jika sampai pada tahun 1960-an, terutama pada daerah-daerah pertanian di Pulau Jawa pada umumnya terdapat berbagai jenis tanaman padi, palawija dalam suatu areal persawahan, maka setelah Revolusi Hijau dengan diperkenalkannya berbagai padi jenis unggul, maka apa yang kita jumpai dewasa ini ialah penyeragaman jenis tanaman padi unggul pada areal persawahan yang luas.

Sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, apakah cara dan kebiasaan menanam padi yang lebih tradisional harus serta merta diganti atau diambil alih, karena telah diperoleh penemuan teknologi baru yang memiliki jangka waktu penanaman yang lebih pendek, dan hasil per hektare yang lebih banyak.

Demikian pula halnya dengan penggunaan obat-obatan anti hama (insektisida, pestisida) dan pupuk hasil teknologi kimia modern, apakah obat-obatan itu telah berhasil kemanjurannya? Dengan penggunaan alat-alat pertanian modern, apakah telah tersedia penampungannya bagi buruh tani yang tersingkirkan dari wilayah pertanian? Seberapa jauh penyeragaman jenis padi unggul ada relevansinya dengan merajalelanya hama, terutama hama wereng?

Menurut seorang ahli ekologi Indonesia, Prof. Otto Sumarwoto, kemungkinan sekali bahwa hama wereng atau apapun jenisnya hama tersebut cenderung menyerang tanaman yang satu saja jenisnya, dalam hal ini varitas unggul. Sedangkan sebelum tahun 1960-an terdapat puluhan, bahkan ratusan jenis padi di sebuah areal persawahan, belum lagi aneka ragamnya palawija yang merupakan tanaman tumpang sari. Sehingga kalau terjadi serangan hama, maka yang diserang hanya jenis tanaman tertentu, dan jenis tanaman lainnya yang tidak disukainya, bebas dari gangguan hama.

Secara tidak sadar kita juga akan melihat adanya suatu keterpaduan kegiatan rakyat pedesaan dalam peningkatan kesejahteraan di wilayahnya pada periode sebelum tahun enam puluhan, karena di samping bertanam padi dan palawija, masih terdapat kegiatan perikanan darat, sungai, peternakan, perkebunan pekarangan dan lain sebagainya. Sehingga seakan-akan terdapat pengefisienan penggunaan waktu dan penggunaan bahan-bahan hasil dan limbah pertanian, palawija, perkebunan, peternakan, perikanan, yang hampir tanpa menggantungkan sama sekali pada pupuk, obat-obatan dan jenis unggul dari tanaman tertentu.

Misalnya dari hasil padi, yang berupa beras, dedak, jerami semuanya dipergunakan untuk makanan manusia (beras), hewan (dedak), jerami untuk atap ataupun sebagian dimasukkan kembali ke dalam sawah untuk pupuk. Jerami dan dedak tadi merupakan pula bahan baku untuk pembuatan kertas

dan sabun dan lain-lain. Demikian juga berbagai jenis tanaman palawija lainnya demikian produktifnya penggunaannya, dari akar, batang, daun, buah, yang kesemuanya dapat digunakan untuk makanan manusia, hewan, pupuk hijau, bahan bakar dan lain-lain. Dari hasil peternakan dan sisa-sisa makanan konsumsi manusia pun dapat di kembalikan ke daerah pertanian, perkebunan, perikanan darat (kolam ikan) sebagai pupuk atau makanan ikan.

Adanya suatu siklus yang teratur ini, yaitu mempergunakan bahan-bahan alam yang ada di suatu desa dari hasil-hasil pertanian, perkebunan, palawija, perikanan darat, peternakan telah merupakan suatu kegiatan desa terpadu, di mana keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga dan terpelihara. Cara dan kebiasaan tersebut bukannya hal yang baru bagi rakyat kita di pedesaan, tetapi merupakan tradisi yang telah lama berjalan, dan akhirnya mulai memudar atau musnah sama sekali karena terdesak oleh teknologi modern, walaupun di sana-sini masih terdapat masyarakat pedesaan yang mampu memelihara dan mempertahankannya. Gejala-gejala ini disebabkan karena terlalu cepatnya proses modernisasi, serta semakin menyempitnya areal tanah pertanian, semakin meningkatnya jumlah penduduk dan berbagai faktor lainnya.

Sehubungan dengan hal itu maka proses modernisasi jelas tidak dapat dicegah lajunya, sebab cepat atau lambat, tetap akan maju dan merembes terus ke seluruh wilayah pedesaan di tanah air kita. Yang ingin kita himbau di sini, ialah seberapa jauh kita mampu untuk tidak saja mengetrapkan teknologi baru yang tepat guna, tetapi juga yang selektif, bertahap, tanpa mencapai usaha target-targetan, dan tidak pula harus dilaksanakan secara seragam. Dengan jalan demikian, diharapkan bahwa proses penyesuaian nilai-nilai tradisional dengan unsur-unsur modern itu dapat berjalan dengan pentahapan yang lebih wajar, berimbang dan serasi, sehingga tidak menimbulkan gejala-gejala sosial yang menonjol.

3. PENGGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA SELEKTIF

Dari pengalaman perbandingan pemakaian pupuk dan obat-obatan anti hama tanaman di Amerika Serikat dan RRC, ternyata bahwa hanya sejumlah obat-obatan yang betul-betul efektif dalam pembasmian hama tanaman dapat digunakan. Di kedua negara tersebut sekarang dilakukan pemakaian obat-obatan yang selektif, dan cara teknik penyemprotan yang tepat, demikian juga suatu cara penggunaan bahan-bahan alamiah anti-hama tanpa menggunakan produk teknologi kimia telah pula diperkenalkan.

Di Amerika Serikat misalnya, untuk penyemprotan suatu areal tanaman kapas, tidak lagi dilakukan penyemprotan secara menyeluruh, tetapi secara selektif diteliti dahulu, bagian mana dari areal tanaman tersebut yang betul-betul terserang penyakit, dan jika telah diketahui, hanya tempat itulah yang disemprot. Di samping itu di sekeliling areal perkebunan kapas tersebut ditanami pohon-pohon pelindung, di mana nantinya hama itu akan menyerang pohon-pohon pelindung terlebih dahulu, sebelum menyerang tanaman kapas tadi. Menurut catatan pemberantasan hama dengan cara tadi, telah dapat dihemat berjuta-juta dollar AS.

Seperti halnya di Amerika Serikat, RRC pun telah mulai menggunakan obat-obatan anti hama tanaman secara selektif, di samping memakai sumber-sumber daya alam dan manusia serta hewan yang ada di wilayah. Misalnya dalam suatu areal persawahan terdapat serangan hama, maka diadakan pengecekan terlebih dahulu, bagian manakah yang paling parah yang mendapat serangan. Seorang petani mengibarkan sebuah bendera putih, yang menunjukkan bahwa bagian/tempat itulah yang paling banyak diserang hama. Maka secara beramai-ramai penduduk desa di sekitar itu menggiring hewan ternak bebek, itik ke tempat tersebut untuk membasmi hama tadi. Di samping mempergunakan sumber-sumber alam dan manusia serta hewan, sudah tentu dipakai pula insektisida dan pestisida, setelah terlebih dahulu dilakukan seleksi keampuhannya obat-obatan tersebut.

Kepopuleran Revolusi Hijau telah menggeser beberapa jenis tanaman pangan yang mengandung protein tinggi, yang mungkin secara turun-temurun digunakan sebagai makanan utama di suatu wilayah tertentu, tetapi karena kurang populer secara nasional, mulai tergeser oleh tanaman pangan jenis unggul. Tanaman tradisional tersebut mungkin merupakan padi-padian, kacang-kacangan, ubi-ubian, atau tepung dari batang misalnya sagu. Penyeragaman jenis tanaman kita akan menguntungkan dan efisien mengingat tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, dan populasi yang semakin bertambah, serta areal pertanian yang semakin menyempit. Tetapi akan mengandung bahaya, jika tiba-tiba terjadi malapetaka alam (gempa bumi, banjir, angin topan, hama), dan situasi pangan dunia untuk jenis-jenis pangan tertentu (beras, gandum) yang juga terkena fluktuasi situasi dunia (ekonomi, keamanan dan politik). Sehingga penganeekaragaman yang dianjurkan oleh pemerintah itu sebenarnya membangkitkan atau menghidupkan kembali tradisi yang sudah ada di negara kita, dan membudayakannya kembali ke dalam masyarakat luas yang mungkin telah ditinggalkan oleh generasi mudanya.

Sementara itu terjadi pula gejala, bahwa menanam jenis tanaman pangan tertentu (misalnya padi), terlalu banyak mengandung resiko (langkanya buruh

tani, malapetaka alam, rendahnya harga), maka sekarang terdapat kecenderungan pula untuk beralih ke tanaman keras yang mempunyai nilai-nilai keuntungan yang lebih banyak daripada padi, dan resiko pemeliharaan yang lebih sedikit. Jika dilihat dari aspek tersebut, maka pengalihan usaha dari tanaman pangan padi atau lainnya, ke tanaman keras seperti cengkeh, memang dapat dimengerti. Tetapi semakin menyempitnya areal persawahan di negara kita, dan pada waktu yang sama semakin meningkatnya jumlah penduduk, terutama di Pulau Jawa, apakah pengalihan jenis usaha tanaman tersebut dapat ditoleransikan untuk jangka waktu panjang, dengan mengingat pula faktor-faktor keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

4. LISTRIK MASUK DESA DAN EFISIENSI PENGGUNAAN WAKTU

Walaupun berbagai rencana mungkin telah disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah tentang efisiensi penggunaan waktu dan relevansinya dengan Listrik Masuk Desa (LMD), tetapi untuk sebagian besar rakyat pedesaan kesempatan tersebut lebih banyak digunakan untuk rekreasi keluarga, kegiatan diskusi, atau kegiatan lainnya yang tidak begitu produktif. Menterpadukan LMD dengan efisiensi penggunaan waktu masyarakat pedesaan dipersulit, mengingat kaburnya batas-batas bekerja di sawah, ladang, kolam, waktu istirahat, rekreasi dan lain sebagainya. Suatu hal yang mungkin telah diambil manfaatnya oleh desa tertentu, yaitu adanya harapan turunnya laju kenaikan angka kelahiran, karena dengan LMD maka waktu untuk tidur akan berkurang.

Di samping untuk rekreasi, diskusi dan lain sebagainya, maka LMD harus digunakan untuk meningkatkan daya penduduk desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan sampingan produktif, di samping pekerjaan rutin sebagai petani, peternak, pemelihara ikan, sehingga dengan demikian diharapkan pendapatan masyarakat pedesaan akan meningkat pula.

Dengan membaiknya penerangan di malam hari, maka waktu senggang di malam hari itu, selain dipakai untuk rekreasi (olah raga, seni), diskusi, dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan kerajinan tangan (ukir-ukiran, anyaman, merenda, menjahit, montir mekanik, dan sebagainya), sehingga betul-betul akan terasa manfaatnya kehadiran LMD tersebut dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dari kegiatan mencangkul tanah, menanam, menyang, sampai tanaman berbuah, maka tidak seluruh waktu petani ataupun orang-orang di pedesaan dicurahkan selama tiga sampai empat bulan di sawah-sawah mereka. Walaupun prosesnya merupakan proses yang berkesinambungan, pasti akan ter-

dapat waktu-waktu senggang di antara kegiatan pengolahan sawah, kebun, ladang, kolam ikan, peternakan, dan lain sebagainya yang tidak ada aktivitas sama sekali. Waktu-waktu senggang inilah yang mungkin merupakan sumber potensial bagi masyarakat desa untuk dapat ditingkatkan efisiensinya.

Jika sekarang telah timbul satu dua mini-industrial estate di berbagai wilayah Pulau Jawa, maka patut dipertimbangkan pembentukan rural small scale industries, yang diintegrasikan dalam sebuah kawasan industri mini di ibukota Kabupaten. Hasil yang diharapkan dari proyek ini, ialah perusahaan yang tergabung dalam mini-industrial estate di ibukota Kabupaten hanya mengerjakan semacam industri perakitan, sedangkan komponen atau bahan-bahan baku lainnya disuplai dari berbagai kegiatan industri kecil pedesaan (rural small scale industries). Dengan demikian akan terjadi mata rantai kegiatan yang akan mendorong para pemuda pedesaan untuk melakukan kegiatan aneka ragam, dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, sampai kepada permesinan, pertukangan dan kerajinan.

Idealnya memang pihak BUUD/KUD yang harus menanganinya atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut, dibantu oleh Departemen Perindustrian melalui dinas-dinasnya di Kabupaten. Di samping koordinasi dengan Departemen Perdagangan untuk pemasarannya. Manakala koordinasi dan penanganan kegiatan tersebut belum dimungkinkan oleh lembaga-lembaga tersebut tadi, maka Pemerintah Daerah dapat meminta konsultasi atau kerja sama dengan Pusat-pusat Pengabdian Masyarakat dari berbagai Lembaga Perguruan Tinggi yang ada.

Salah satu kelemahan dalam pembinaan wiraswasta-wiraswasta kecil atau golongan ekonomi lemah di pedesaan ialah kurang terpadunya sistem perkreditan yang umumnya ditujukan untuk proses produksi, dengan sistem pengadaan (suplai), dan pemasaran (marketing), sehingga terjadi putusannya hubungan antara produksi dan pemasaran, ataupun produksi dan penyediaan bahan-bahan baku. Walaupun tujuan berbagai macam usaha perkreditan ringan murah itu sangat mulia, tetapi ternyata perkaitannya kurang sekali pada sistem pengadaan bahan dan pemasaran hasil produksi. Akhirnya si wiraswasta kecil pedesaan itu, hasil produksinya jatuh lagi ke tangan tengkulak, atau dipermainkan oleh pengusaha-pengusaha besar di perkotaan.

Jika LMD, penggunaan efisiensi waktu, perkreditan, pengadaan, dan pemasaran dapat diintegrasikan kegiatannya di bawah koordinasi badan pemerintah, maka tidak dapat disangkal lagi potensi desa yang ada sekarang dapat ditingkatkan lagi. Khusus dalam bidang pemasaran, terutama untuk hasil-hasil kerajinan, maka tiap-tiap desa hendaknya dapat memasarkan hasil-hasil produksinya (di luar hasil pangan, ataupun tanaman keras), di ibukota-

ibukota Kabupaten dalam suatu pameran permanen (cottage industry emporium), dan pada gilirannya hasil produksi dari seluruh Kabupaten dipasarkan, dan dipamerkan secara permanen (cottage emporium) di ibukota propinsi, dan demikian seterusnya dari hasil produksi masyarakat pedesaan sepropinsi dipamerkan dan dipasarkan secara permanen di ibukota negara, misalnya yang telah sebagian terlaksana di Taman Miniatur Indonesia Indah, untuk anjungan sementara propinsi.

Walaupun pada dewasa ini mata rantai pengadaan, produksi dan pemasaran untuk sementara wilayah di Indonesia sudah dilakukan, tetapi belum ada koordinasi dan keterpaduan yang mantap, sehingga masih perlu untuk ditingkatkan lebih lanjut. Misalnya bidang pembelian harus diawasi dan dikoordinasi oleh pemerintah, sehingga para produsen, yang terdiri dari petani, peternak, pengrajin, atau ahli-ahli pertukangan (pandai besi dan lain-lain), tidak dirugikan.

Kecuali tenaga listrik dari diesel atau uap yang umumnya berada di kota-kota, maka tenaga listrik dari air sebetulnya banyak yang berasal dari daerah pedesaan (Cibadak, Jatiluhur, Pengalengan dan lain-lain), yang kemudian didistribusikan ke seluruh wilayah, terutama perkotaan. Dalam hal listrik PLTA, maka hendaknya dibuat kebijakan baru, bahwa wiraswasta-wiraswasta kecil dari masyarakat pedesaan yang menggunakan tenaga listrik untuk keperluan industri-industri kecil (small scale industry) atau industri kerajinan rumah (cottage industry) mendapat keringanan sewa listrik tersebut, dan tarifnya paling sedikit tidak dipersamakan dengan konsumen perusahaan industri besar.

Dengan jalan ini diharapkan bahwa industri-industri kecil masyarakat pedesaan akan bermunculan, sehingga dapat pula sebagai alternatif daripada pekerjaan tradisional mereka, apalagi dengan semakin menyempitnya areal pertanian. Dengan murahnya sewa listrik untuk industri-industri kecil masyarakat pedesaan, maka mungkin saja bahwa para pengusaha industri besar akan mengadakan sub-contract dengan wiraswasta-wiraswasta kecil pedesaan tersebut untuk mensuplai jenis-jenis barang atau komponen tertentu.

Jika hal ini dapat direalisasikan maka diharapkan bahwa arus urbanisasi akan dapat dikurangi, karena pendapatan masyarakat pedesaan akan meningkat (seperti di Korea Selatan di mana pendapatan per kapita rakyat desa lebih tinggi daripada penduduk perkotaan). Pemerataan pembangunan dan pendapatan yang digariskan oleh pemerintah dalam Pelita kita, akan juga menjadi kenyataan.

5. KEWIRASWASTAAN DESA

Para cendekiawan atau perencana, teknokrat dan masyarakat perkotaan umumnya cenderung untuk meremehkan potensi pemikiran rakyat pedesaan, yang disebut terakhir ini biasanya diasosiasikan dengan sikap primitif yang seolah-olah merupakan hambatan dalam laju pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan tersebut.

Paket teknologi pembangunan dan seperangkat kebijakan dari ataslah yang dianggap paling tepat, dan rakyat pedesaan hanya menerima saja, tanpa harus memberi komentar atau pemikiran lebih lanjut, tentang apa yang sebaiknya paling layak dilaksanakan di wilayah mereka itu. Tidak saja dalam pemikiran kebijakan itu sendiri, tetapi apalagi dalam bidang teknis, rakyat pedesaan dianggap inferior daripada masyarakat perkotaan. Kalaupun rakyat pedesaan harus turut serta aktif dalam pelaksanaan pembangunan, maka partisipasi itu dalam pelaksanaan kegiatan fisik, dalam bentuk bantuan tenaga dan penghimpunan dana untuk melakukan proyek-proyek tertentu.

Yang ingin kami tekankan di sini ialah mendayagunakan partisipasi pemikiran masyarakat desa dalam berbagai macam perencanaan atau pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Sangat mungkin saja bahwa di antara pimpinan formal dan informal di masyarakat pedesaan itu terdapat pemikiran-pemikiran yang bagus dan praktis untuk dilaksanakan dalam pembangunan wilayah mereka. Terjadinya desa dengan perpaduan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, irigasi, terasering sawah, sawah tadah hujan, padi gogorancah, dan pekerjaan padat karya melalui gotong royong, merupakan proses yang telah berjalan ribuan tahun di tanah air kita ini. Sehingga tidak habis terpikir oleh kita, bagaimana mereka bisa memelihara dan mempertahankan nilai-nilai yang unik dan luhur itu secara turun-temurun, yang merupakan kebanggaan kebudayaan nasional kita semua.

Sehingga alangkah ganjilnya bahwa negara-negara berkembang yang tengah mengadakan kegiatan pembangunan nasionalnya mengambil begitu saja aspek-aspek modernisasi dari Barat tanpa melihat implikasinya secara lebih jauh, sedangkan sementara itu ahli-ahli masalah pembangunan dari Barat membuat berbagai macam teori pembangunan wilayah dan pedesaan negara-negara berkembang, dan beberapa sektor pembangunan di negara-negara Barat sendiri, di samping beralih kepada penggunaan teknologi industri yang lebih sofistikasi, juga berusaha untuk menggunakan teknologi sederhana, terutama yang hemat energi, sehingga mesin-mesin boros energi dilempar ke negara-negara berkembang.

Karena itu merupakan sikap apriori jika dikatakan bahwa masyarakat pedesaan itu bodoh dan hanya patut menerima saja apa yang diberikan oleh pembuat kebijakan atau perencana dari kota-kota besar. Para ahli masyarakat pedesaan kita, seperti Prof. Sartono Kartono Kartodirdjo, Prof. Mubyarto, dan sejumlah lembaga-lembaga pembangunan masyarakat desa nonpemerintahan, telah sependapat dengan uraian di atas, bahwa rakyat di pedesaan mempunyai pemikiran dan persepsi sendiri tentang apa yang sebaiknya dibangun di desa mereka, tanpa merusak keseimbangan lingkungan alam sekitarnya, ataupun tanpa terlalu menggantungkan pada teknologi baru.

Jelas kiranya bahwa proses modernisasi seperti diuraikan terdahulu tidak mungkin dibendung lagi arus perembesannya di tanah air kita ini. Namun demikian, jika para taraf nasional kita mempunyai filter, yaitu Pancasila untuk menyaring setiap unsur budaya teknologi asing yang masuk ke negara kita, agar hanya hasil-hasil yang paling bermanfaat saja bagi pembangunan kita yang boleh masuk, maka demikian pula halnya harus terdapat semacam filter lagi yang sanggup menyaring setiap unsur kebudayaan teknologi yang masuk ke pedesaan, sehingga betul-betul yang paling berguna sajalah yang masuk desa tersebut.

Dalam kaitan tersebut di atas, kita tidak menginginkan agar desa itu statis, dan kesejahteraan mereka tidak pernah mengalami kemajuan. Maka di samping adanya pengenalan teknologi baru melalui penyaringan tadi, serta mempertimbangkan pemikiran rakyat desa mengenai pembangunan, maka agar juga dibangkitkan semangat rakyat pedesaan untuk mengadakan penemuan-penemuan mereka sendiri (inovasi, discovery, invention, improvisasi dan lain-lain), yang dapat mendorong kebangkitan kewiraswastaan desa. Untuk mendorong tujuan tersebut, maka sebaiknya di setiap ibukota propinsi paling sedikit, atau setiap ibukota Kabupaten, didirikan semacam museum industri atau teknologi, yang memamerkan atau memperagakan berbagai macam teknologi tradisional dan modern, sehingga akan merangsang para pemudanya untuk berwiraswasta dalam bidang-bidang penemuan tadi.

Dalam rangka membangkitkan kewiraswastaan desa tadi, jika seandainya ada di antara mereka yang menonjol dalam bidang pertanian, perkebunan, industri kecil, peternakan (pemerahan susu, bulu biri-biri untuk bahan wol, ulat sutera dan sebagainya), maka selain usaha pemerintah untuk memberikan kredit ringan (dengan menyeleksi bank yang mampu memberikan bunga rendah dan jangka waktu cicilan panjang), juga tindakan lainnya, ialah mengusahakan atau memberi nasehat mengenai lokasi, jenis ternak unggul, atau tanaman unggul, mesin industri jika pabrik akan didirikan, yang paling baik, murah dan strategis untuk memasarkannya. Bimbingan pemerintah tidak hanya sekedar dalam pengadaan bahan baku, mesin-mesin industri yang

cocok, kredit yang murah, tetapi juga kalau perlu memberikan nasehat manajemen kewiraswastaan desa itu sendiri, sehingga merupakan paket bantuan pemerintah yang terpadu.

6. PROYEK NASIONAL, TRANSMIGRASI, BURUH TANI, PETANI DAN TENAGA KERJA

Sejumlah proyek nasional yang bersifat raksasa terdapat di daerah pedesaan, misalnya Jatiluhur, Asahan, beberapa kilang minyak dan gas alam, serta perusahaan tambang lainnya. Penduduk pedesaan hendaknya mendapatkan keuntungan dari adanya proyek tersebut, tidak hanya sekedar memperoleh kemanfaatan setelah proyek itu selesai, misalnya pengairan sawah yang lebih teratur, aliran listrik dan sebagainya, tetapi sejak semula proyek itu dibangun sampai proyek itu selesai, apalagi ditingkatkan menjadi industri, seperti peleburan aluminium Asahan, maka penduduk pedesaan sekitarnya, terutama angkatan kerja pemudanya, hendaknya dilibatkan aktif dalam berbagai tahapan proyek tersebut.

Tidak jarang terjadi, bahwa pemuda-pemuda desa begitu antusiasnya dengan adanya suatu proyek nasional di daerahnya, kemudian mereka meninggalkan pekerjaan tradisionalnya untuk dapat bekerja di proyek tersebut. Tetapi frustrasilah yang menimpa mereka, karena sejumlah jenis pekerjaan tertentu, tidak hanya sekedar memerlukan unskilled labor secara intensif, tetapi memerlukan skilled labor intensif, yang memerlukan pendidikan khusus. Biasanya para sub-kontraktor, atau kontraktor utama lebih suka mencari penyelesaian secara mudah, yaitu merekrut pemuda kota-kota besar yang dasar ketrampilannya telah ada. Sementara itu para pemuda desa yang kecewa tadi, dalam keadaan dilema, karena kembali ke desanya lagi sudah tidak ada harapan atau malu, akhirnya meninggalkan desanya menuju kota-kota besar. Masalah urbanisasi ini jika tidak secara cepat dan mantap ditanggulangi dari sekarang, akan menimbulkan masalah tidak hanya di perkotaan saja, tetapi di beberapa desa sudah mulai kekurangan angkatan kerja muda.

Dengan pengawasan dan bimbingan ketat dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tenaga Kerja, maka para kontraktor diharuskan untuk memakai tenaga lokal desa di mana proyek dibangun dengan prosentase tertentu, dan hanya bidang ketrampilan langka yang tidak mungkin direkrut dari desa, maka kontraktor boleh mengambil tenaga dari luar desa itu. Dengan mengadakan pendidikan pemuda dari masyarakat desa, maka proses alih teknologi akan berjalan lebih cepat di tanah air kita.

Umumnya para kontraktor yang mengadakan clearance tanah untuk pemukiman transmigran mempergunakan alat-alat berat modern, yang sangat efisien dan ekonomis. Para transmigran yang berasal dari berbagai daerah pedesaan Jawa, Bali, Lombok tersebut hanya tinggal datang saja untuk menempati dan menggarap wilayah yang telah disediakan tersebut. Proses tersebut dapat menimbulkan keadaan yang menguntungkan dan merugikan pihak transmigran. Menguntungkan transmigran, karena mereka tidak usah susah-susah lagi menebang pohon, membuat jalan, irigasi atau perumahan. Merugikan transmigran, karena tidak semua calon transmigran itu berwira-swasta, tetapi terdapat diantaranya yang lemah, malas dan manja. Sehingga fasilitas-fasilitas yang telah disediakan itu menimbulkan kemalasan dan kemanjaan. Jika subsidi yang diberikan pemerintah habis, tanamantanamannya tidak menghasilkan, irigasi kering, mereka apatis, dan akhirnya mereka meninggalkan pemukiman transmigrasi tadi. Sehingga mubazirlah biaya pemerintah yang menelan beratus-ratus juta rupiah itu.

Yang menjadi pemikiran kami, apakah tidak mungkin dilakukan, bahwa calon transmigran itu, tidak saja buruh tani, petani sawah, tetapi juga peteranak, dan orang-orang nonpetani lainnya, misalnya tukang-tukang, pengrajin, guru-guru, pemuka-pemuka agama dan lain sebagainya, yang biasanya terdapat dalam sebuah desa tertentu, mereka itu diikutsertakan dalam paket transmigrasi. Sehingga jika terjadi kegagalan dalam bidang pertanian, masih terdapat transmigran yang memiliki keahlian lainnya yang dapat dikembangkan.

Sejak semula para calon transmigran harus dilibatkan dalam proyek penyediaan pemukiman transmigrasi (clearance hutan, membuat jalan, irigasi, perumahan dan sebagainya), dengan diberi imbalan gaji yang memadai di samping subsidi yang diterima dari pemerintah, jika mereka terus bermukim di daerah tersebut sebagai transmigran. Dengan melibatkan mereka ke dalam proyek transmigrasi sejak dini sekali, akan diharapkan terjadi proses "sense of belonging" pada proyek transmigrasi tersebut, sehingga mereka betul-betul merasa memilikinya, dan tidak sekedar hanya pindah begitu saja, karena mereka sejak semula ikut membangunnya. Tentu saja para kontraktor harus diikat sedemikian rupa dengan perjanjian, bahwa mereka hanya diperbolehkan memakai alat-alat modern dalam jumlah presentase tertentu saja.

Selain di Luar Pulau Jawa, di daerah Jawa sendiri terdapat sejumlah kecil pemukiman transmigrasi (Ciamis dan lain-lain). Baik proyek transmigrasi Luar Jawa dan Pulau Jawa sendiri, maka penduduk lokal sekitar proyek transmigrasi yang dapat dikategorikan calon transmigran, hendaknya diikutsertakan dalam proyek tersebut, agar jurang sosial-psikologis antara penduduk pendatang dan penduduk setempat dapat ditekan menjadi sekecil-

kecilnya. Sebab di antara penduduk lokal itupun tidak jarang dijumpai keadaan yang lebih buruk lagi daripada keadaan para pendatang transmigran tersebut.

7. MASALAH DAN PROSPEK

Apa yang telah dikemukakan di atas ada di antaranya bukan merupakan masalah baru bagi pengembangan wilayah di Indonesia, tetapi masalah-masalah lainnya mungkin masih dalam taraf perencanaan dan belum dapat dilaksanakan.

Dalam taraf pelaksanaan setiap rencana pengembangan wilayah memang terdapat dilema, antara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara para teknokrat dan kenyataan kondisi yang ada di tingkat pedesaan, atau antara kepentingan nasional dan pengorbanan yang harus dilakukan oleh masyarakat pedesaan untuk kepentingan rakyat banyak.

Apa yang harus dilakukan sekarang dan untuk masa-masa mendatang, yang juga selalu merupakan himbauan dari para cendekiawan pada umumnya, ialah adanya suatu sistem monitoring dan evaluasi yang mantap dari setiap proyek yang dilaksanakan pada taraf pembangunan dan pengembangan wilayah. Setiap kelemahan dari suatu proyek pengembangan wilayah harus sedini mungkin dapat dideteksi, dan segera dicari jalan keluarnya.

Pihak peneliti atau penganalisa masalah pembangunan tadi harus dapat meyakinkan para pembuat kebijakan dan keputusan, bahwa perubahan atau penggantian suatu pola pengembangan wilayah perlu dilakukan, jika kerugian atau malapetaka yang lebih buruk ingin disingkirkan sejauh-jauhnya. Proses ini memang sukar untuk dilaksanakan karena terdapat begitu banyak kepentingan yang berbelit-belit dan bertumpang tindih antara berbagai lembaga pusat maupun daerah.

Namun rasa pesimisme tersebut tidak perlu ditonjolkan, karena dengan tekad yang bulat dan kemauan yang kuat dari para pimpinan pemerintah dan masyarakat, di pusat maupun di daerah pedesaan, maka suatu rencana yang baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, cepat atau lambat, pasti akan terwujud.

Sudah tentu pihak pelaksana pengembangan wilayah pedesaan tersebut tidak boleh putus asa, karena dengan segala ketekunan dan alat-alat mekanisme yang ada, tujuan yang mulia itu tentu akan terwujud.

CATATAN KEPUSTAKAAN

- 1 Roesnadi, Sutomo Dr., "Masalah Pangan dan Alternatif Menu Makanan", *Dagang dan Industri*, No. 3, Tahun III, 1979
- 2 Roesnadi, Sutomo Dr., "Transmigrasi, Masalah Pangan dan Tenaga Kerja", *Dagang dan Industri*, 1980
- 3 Roesnadi, Sutomo Dr., "The Transfer of Technology and Dependence: A Dilemma for the Third World Countries", a paper presented to An International East-West Center Alumni Reunion Convention and Symposium, Seoul, Korea, August 2-6, 1979, in its *Proceedings*
- 4 Ruddle, Kenneth and Chesterfield, Ray, "Traditional Skill Training and Labor in Rural Societies", *Journal of Developing Areas*, 12 July 1978
- 5 Vietmeyer, Noel, "Poor People's Crops", *The FAO Review of Agriculture and Development*
- 6 Zavala, Hector Luis Morales, "Rural Development, Science and Political Decision-Making: Diverging or Converging Tendencies", *Journal of Developing Areas*